

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi partai politik di Jepang sudah dimulai sejak akhir era Meiji, yaitu pada tahun 1890-an. Program Misi Iwakura yang diketuai oleh Iwakura Tomomi dalam rangka mempelajari sistem pemerintahan dan ekonomi di negara-negara Barat pada tahun 1871-1873 membuahkan reformasi politik yang melahirkan ormas politik (kelompok oposisi) pertama di Jepang, yaitu *Aikoku Koto* pada tahun 1874 oleh Itagaki Taisuke dalam rangka menjalankan *jiyu minken undo* atau ‘Gerakan untuk Kebebasan dan Hak Sipil’, dan pada tahun yang sama kelompok *Aikoku koto* tersebut telah di bubarkan.

Perkembangan ini terus mengalami kemajuan pada saat Jepang memasuki era demokrasi Taisho (1912-1926) ketika parpol mulai bermunculan dan mengikuti pola partai-partai modern yang berkembang pesat di negara-negara Barat, khususnya Inggris Raya dengan sistem demokrasi parlementernya. (Larry Diamond dan Marc F. Plattner, 1998:88)

Model ini cukup terkenal dalam basis masyarakat Jepang, mengingat kiprah partai berbasis massa, dukungan sosial dan prinsip yang jelas. Selama periode ini, parlemen didominasi oleh partai *Rikken Seiyukai*, partai terbesar di Jepang pada masa itu dengan oposisi terbesar *Rikken Minseito*. Mengingat gelombang demokrasi di Jepang memiliki pola pasang-naik dan pasang-surut sejak Restorasi Meiji hingga sekarang, peranan partai politik dalam tatanan pemerintahan di Jepang juga mengalami hal yang serupa.

Sejak Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, secara resmi Jepang telah mengakhiri periode militerismenya yang ekspansionis di sebagian wilayah Asia. Satu-satunya negara Sekutu yang mengambil-alih pemerintahan Jepang sejak masa itu adalah Amerika Serikat yang dinaungi oleh *Supreme Commander of the Allied Powers* (SCAP) dan *General Headquarters* (GHQ).

Sejak masa pendudukan Amerika Serikat ini, Konstitusi Meiji yang berlaku sejak tahun 1889 hingga menyerahnya Jepang kepada pasukan Sekutu

digunakan sebagai landasan konstitusional Jepang dihapuskan dan diganti dengan *Heiwa Kenpo* (Konstitusi Damai) atau yang lebih dikenal sebagai Konstitusi Jepang pasca-perang pada tanggal 3 Mei 1947. (Mahendra Prakash, 2004:38)

Parlemen Jepang saat ini, yang disebut “Diet,” mengalami perubahan setelah Perang Dunia Kedua, akibat diberlakukannya konstitusi baru secara resmi tahun 1947, berbeda dengan sistem parlemen pra-perang. Menurut konstitusi baru, Diet adalah lembaga tertinggi kekuasaan negara.

Perbedaan sistem parlemen pra perang dengan sistem parlemen pasca perang (Konstitusi baru 1947) adalah jika sistem pra-perang kedaulatan terletak tidak kepada masyarakat sipil tetapi pada kaisar. Diet memang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam sistem politik, tetapi tidak memiliki kekuatan yang absolut, karena secara teoritis kekuasaan negara hanya terletak pada otoritas kaisar. Di bawah konstitusi Meiji, diet terdiri dari *House of Representative* (DPR) dan *House of Peers* (bangsawan atau kaisar).

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke II, Jepang mengalami proses demokrasi yang cukup pesat. Dengan sistem kepartaian sebelum Perang Dunia ke II, membuat Jepang tidak kesulitan menjalankan sistem demokrasi parlementer pasca Perang Dunia ke II, adalah Partai Liberal Demokrat / *Liberal Democratic Party* / *Jiyu Minsyu To* (LDP) sebuah partai konservatif yang berdiri pada tahun 1955, kemudian muncul mendominasi perpolitikan di Jepang pasca Perang Dunia ke II, lebih tepatnya dominasi ini dimulai sejak pertengahan tahun 50-an. (Larry Diamond dan Marc F. Plattner, 1998:88)

Selama lebih dari empat dekade, dominasi LDP ini nyaris tak tergoyahkan. LDP memang sempat mencicipi pahitnya kekalahan pada pemilu Majelis Tinggi pada pemilu tahun 1989 dan sempat kalah di Majelis Rendah pada tahun 1993 oleh koalisi tujuh partai yang membuatnya menjadi oposisi untuk pertama kali. Tetapi, kekalahan ini hanya berlangsung sebentar, sebab hanya setahun kemudian, LDP kembali menikmati empuknya kursi kekuasaan.

Kemunculan Partai Demokrat / *Democratic Party of Japan* / *Minsyu To* (DPJ) pada tahun 1998, ternyata turut merubah peta perpolitikan di Jepang. DPJ yang didirikan oleh beberapa tokoh LDP yang menggandeng beberapa partai oposisi yang ada, ternyata mampu menyedot perhatian masyarakat dan menjadi

ancaman potensial bagi LDP. DPJ yang memposisikan diri sebagai oposisi dari partai berkuasa, yaitu LDP, membuktikan tajinya dalam politik. Pemilu Majelis Tinggi pada tahun 2004 silam menjadi ajang pembuktian dengan keberhasilan DPJ menguasai kursi mayoritas di Majelis Tinggi.

Hal ini kemudian banyak menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan LDP terdepak untuk kedua kalinya dari tampuk kekuasaan. Spekulasi ini didukung oleh adanya berbagai skandal dan penyimpangan yang dilakukan oleh politisi LDP yang membuat partai konservatif terbesar di Jepang itu menurun pamornya, terlebih ketika dipimpin oleh Abe. Otomatis, hal ini memberikan dampak positif kepada DPJ.

Pada pemilu tahun 2009, pada masa kepemimpinan Taro Aso sebagai ketua partai LDP. Pada masa kepemimpinannya, partai LDP kalah dalam pemilu di Majelis Rendah dan hanya menyisakan 119 anggota di Majelis Rendah, partai yang selama puluhan tahun mendominasi politik di Jepang kalah telak oleh partai oposisi lain yaitu, partai DPJ. Pada saat itu DPJ menang telak dari LDP yang memperoleh 308 dari 480 suara di Majelis Rendah. Taro Aso yang menjabat menjadi perdana menteri dan sebagai ketua partai pada tahun itu, mengakui kekalahannya dari DPJ. (<http://www.dw.com/id/peta-politik-jepang-berubah-pasca-pemilu/a-4613374>)

“Saya harus memikul tanggung jawab bagi kekalahan ini. Partai LDP dan saya sendiri harus menerima keputusan rakyat dan menganggapnya serius. Kami harus berani untuk membuka lembaran baru. Sebagai anggota biasa Partai LDP, saya akan berusaha sedapat mungkin untuk mendukung awal yang baru.” ujarnya. Di malam setelah pemilu, Taro Aso mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua partai di mana Partai Demokrat Liberal (LDP) sudah memimpin pemerintahan Jepang selama kurang lebih 54 tahun. Kini, LDP harus belajar bertindak sebagai partai oposisi dan masih belum jelas, apakah pengganti Taro Aso akan mampu memperastukan kubu-kubu dalam partai LDP.

Sementara itu, partai DPJ telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kursi pemerintahan Jepang, meski menang telak dalam pemilu, ketua partai DPJ yaitu, Yukio Hatoyama, akan tetap menahan diri dalam mengambil alih kursi

jabatan Perdana Menteri. (<http://www.dw.com/id/peta-politik-jepang-berubah-pasca-pemilu/a-4613374>)

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusi Jepang, rakyat mendorong perubahan haluan dan dengan berani memilih pemerintahan yang baru. Sebagai wakil Partai Demokrat saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami. Sekarang waktunya tiba untuk mulai bekerja. Ini bukan hanya kemenangan Partai Demokrat tapi seluruh rakyat yang hidup dalam kondisi sulit. Mereka sangat marah pada pemerintahan sebelumnya. Karena itu, kami dengan rendah hati menerima tugas ini dan akan menjalankan kebijakan politik kami sesuai dengan amanat rakyat dan penuh rasa hormat." ujarnya.

Yukio Hatoyama yang akan ditetapkan sebagai Perdana Menteri baru Jepang, berencana untuk fokus pada masalah finansial dengan struktur baru. Kekuasaan pada birokrat di kementerian Jepang akan dipatahkan sehingga memberikan ruang yang cukup luas untuk para politisi. Sistem baru ini akan diuji coba dalam perundingan anggaran rumah tangga mendatang. (<http://www.dw.com/id/peta-politik-jepang-berubah-pasca-pemilu/a-4613374>)

Setelah Yukio Hatoyama terpilih menjadi Perdana Menteri, DPJ mengeluarkan serangkaian dokumen yang berisikan platform kebijakan DPJ yang berjudul "Manifesto DPJ 2009." Di dalam dokumen tersebut terdapat beberapa hal penting terkait kebijakan domestik dalam pemerintahannya empat tahun ke depan. Berikut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Manifesto DPJ :

1. Kebijakan yang berupaya menghentikan pengeluaran anggaran yang tidak penting yang bersifat pemborosan, hal ini berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas birokrasi. DPJ akan memberhentikan pegawai pensiunan yang masih aktif di dalam birokrasi pemerintahan, menghapuskan skema anggaran pajak keuangan yang dipandang tidak efisien. Dalam hal ini, DPJ akan melarang perusahaan atau organisasi memberikan donasi politik bagi partai yang bersangkutan, dan upaya menghemat anggaran juga diwujudkan dengan mengurangi jumlah kursi perwakilan dalam Majelis Rendah sebanyak 80 kursi.
2. Memberikan bantuan dana pendidikan sebesar 312.000 yen per-tahun, hingga tamat sekolah tingkat pertama (SMP). Selain membebaskan

biaya pendidikan sekolah, memperbanyak jalur dan akses beasiswa secara inklusif di lingkungan perguruan tinggi.

3. Memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan bagi para pensiunan. Dalam platform kebijakan DPJ, ingin menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, dalam arti DPJ akan mengeluarkan kebijakan dengan proporsi pendapatan pensiunan serta jaminan dasar pensiunan. Hal ini ditujukan untuk menghindari penduduk Jepang dengan pendapatan pensiunan yang tidak memadai dan tidak mendapat jaminan keuangan pensiun.
4. Tentang pengangguran dan kebijakan ekonomi. DPJ akan menjalankan pengurangan rasio pajak bagi usaha kecil dan menengah hingga 11 persen dan bagi para pengangguran, DPJ akan memberikan dana bantuan sebesar 100.000 yen per-bulannya selama pelatihan kerja. Selain itu, DPJ akan memperjuangkan persamaan hak, asuransi, dan jaminan para pegawai laki-laki maupun perempuan, serta pegawai tetap dan tidak tetap. Dalam bidang ekonomi, DPJ akan menggantikan kebijakan *The Council of Economic and Fiscal Policy* menjadi *National Strategy Bureau*, yaitu sebuah badan penasehat kebijakan bagi Perdana Menteri. (<http://www.dw.com/id/peta-politik-jepang-berubah-pasca-pemilu/a-4613374>)

Kemenangan DPJ ini tidak menutup kemungkinan bahwa LDP sudah tidak memiliki peluang untuk merebut kursi di Diet, justru dari kekalahan ini LDP dapat belajar dari kekalahannya. Jajak pendapat dari sebuah media *online* memang memprediksi keunggulan dari kubu demokrat, tetapi LDP mungkin akan mampu menarik kembali pemilih konservatif dengan tuduhan kubu demokrat lemah dalam bidang keamanan dan tidak patriotis. Kemenangan tipis juga mempengaruhi pembentukan kabinet baru, bahwa dalam waktu 30 hari setelahnya, parlemen harus memilih perdana menteri baru.

Setelah Yukio Hatoyama menjabat selama 1 tahun menjadi Perdana Menteri Jepang dan dia memilih untuk mundur dari kursi jabatan menjadi Perdana Menteri Jepang, dikarenakan pada masa jabatan Yukio Hatoyama banyak masalah di negara Jepang yang tidak dapat terselesaikan dan kebijakan pemerintahan yang

kontroversial selama Yukio Hatoyama menjabat menjadi Perdana Menteri Jepang. Beberapa alasan Yukio Hatoyama memilih untuk mundur dari kursi jabatannya antara lain, pengalokasian dana pemerintahan dan rancangan undang-undang pembatasan pekerja paruh waktu. Salah satu persoalan yang paling banyak menyita perhatian masyarakat Jepang adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa.

Pada masa kampanye, Hatoyama berhasil meraih dukungan besar dari masyarakat karena menjanjikan pemindahan pangkalan militer tersebut keluar dari Jepang. Rakyat Okinawa sendiri sejak lama menginginkan agar pangkalan udara Amerika Serikat yang dihuni oleh separuh dari 47 ribu perajurit AS yang ditempatkan di Jepang itu dipindahkan, karena mereka mengganggu dampak lingkungan yang berat, rawan kecelakaan, polusi dan kebisingan, selain itu peningkatan kriminalitas dan tekanan sosial.

Setelah Yukio Hatoyama mundur dari jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang selama 1 tahun, digantikan oleh Naoto Kan pada periode 2010-2011. Perdana Menteri Jepang Naoto Kan yang selama ini berada di bawah tekanan besar. Kan mendapatkan kecaman karena dianggap tidak memperlihatkan kepemimpinannya pasca gempa dan tsunami pada 11 Maret 2011, yang kemudian menyebabkan krisis nuklir di Jepang dan akhirnya pada tahun 2011 Naoto Kan mengundurkan diri menjadi Perdana Menteri Jepang. (<http://www.dw.com/id/yoshihiko-noda-gantikan-naoto-kan/a-15352412>)

Pasca pengunduran diri Naoto Kan pada 2 September 2011, Partai Demokrat Jepang (DPJ) yang berkuasa akan memilih pemimpin barunya yang hampir dipastikan akan langsung menjadi Perdana Menteri Jepang selanjutnya. Pada bulan yang sama, Yoshihiko Noda terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan Naoto Kan. Noda dikenal sebagai pembela disiplin anggaran rumah tangga. Ia menentang kuatnya nilai mata uang Yen, guna memberi kekuatan baru bagi ekonomi Jepang.

Noda ingin menurunkan hutang negara dan bahkan untuk itu bersedia menaikkan pajak. "Reformasi sistem perpajakan dan sistem sosial adalah tugas yang tidak dapat dihindari. Penting untuk mempersiapkan dengan baik rencana reformasi ini. Tentu saja sulit menjelaskan hal itu kepada publik. Tapi kami

adalah partai pemerintah dan oleh sebab itu bertanggung jawab terhadap orang lain," ujarnya. Yoshihiko Noda menjabat 2 September 2011 sampai 26 Desember 2012. (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/08/110826_jepang.shtml)

Pada pemilihan umum tahun 2012, Yoshihiko Noda kalah oleh mantan pemimpin Jepang Shinzo Abe, salah satu saingan terberat dalam pemilihan suara. Setelah Abe memenangkan pemilu pada tahun 2012, Abe tetap berpegang teguh dengan kebijakannya yaitu *Abenomics* dan kebijakan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe, dan juga menjalin kerja sama kepada negara-negara berkembang di dunia dan selama 4 tahun menjabat, Abe dipercayakan kembali oleh masyarakat Jepang untuk menjadi Perdana Menteri Jepang dengan kebijakan *Abenomics*nya, yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan pertumbuhan ekonomi.

Penulis tertarik akan kebijakan Perdana Menteri di Jepang dan kerja sama negara Jepang dengan negara-negara berkembang di dunia. Karena itu penulis mengangkat Kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kerja Sama Jepang dalam Organisasi G7 sebagai bahan penelitian skripsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian, yaitu:

1. Adanya krisis ekonomi yang melanda negara Jepang.
2. Keluarnya kebijakan moneter dan fiskal kepada Bank Of Japan (BOJ).
3. Tidak adanya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal IV.
4. Kerja sama Jepang dengan negara-negara berkembang (G7).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah penelitian dengan, adanya krisis ekonomi, keluarnya kebijakan moneter dan fiskal, tidak adanya pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama dengan negara-negara berkembang (G7).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Kebijakan apakah yang dikeluarkan Shinzo Abe dalam *Abenomics*?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Jepang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi hingga kuartal IV?
3. Mengapa Jepang ingin bekerja sama dengan negara-negara berkembang (G7)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui isi dari kebijakan *Abenomics*.
2. Untuk mencari tahu penyebab Jepang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi hingga kuartal IV.
3. Untuk menjelaskan tujuan Jepang bergabung dengan negara-negara berkembang (G7).

1.6 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Referensi utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku yang berjudul *Democracy in East Asia* karya Larry Diamond dan Marc F. Plattner.

1.7 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi penulis dapat mengetahui tentang dunia politik di Jepang dan kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe.
2. Bagi pembaca, semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu referensi.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II SEJARAH PARTAI LDP DAN KEBIJAKAN SHINZO ABE

Dalam bab ini penulis membahas sekilas sejarah partai LDP, biografi Shinzo Abe, dan kebijakan yang diberikan Shinzo Abe.

BAB III KEBIJAKAN PERDANA MENTERI SHINZO ABE DAN KERJA SAMA JEPANG DALAM ORGANISASI G7

Dalam bab ini penulis menuliskan kebijakan-kebijakan Shinzo Abe dalam mengatasi perekonomian yang melanda Jepang dan usaha Jepang menstabilkan krisis perekonomian dunia dalam kelompok G7.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di atas.